

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 158-165****Licensed By Cc By-Sa 4.0****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14602791>**

Implementasi Pendidikan Inklusif dengan Isu Kesenjangan Akses dan Tren

Ahmad Ali Mustopa¹ Jumriani² Rosdiana³^{1,2,3}Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarEmail: ahmadalimustopa@gmail.com¹ jumriiriani@gmail.com² rosdianasaid@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Namun, implementasi pendidikan inklusif di berbagai daerah masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait kesenjangan akses dan perbedaan tren kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia serta menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang ramah dan setara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, strata sosial serta perbedaan pemahaman terkait konsep inklusi menjadi faktor utama yang menghambat implementasi pendidikan inklusif. Selain itu, tren kebijakan pendidikan yang belum konsisten di berbagai daerah memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi kebijakan pendidikan inklusif yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci : *Implementasi, Pendidikan Inklusif, Isu Kesenjangan Akses dan Tren*

Abstract

Inclusive education is an educational approach that aims to provide equal learning opportunities for all students, including those with special needs. However, the implementation of inclusive education in various regions still faces major challenges, especially related to the gap in access and differences in policy trends. This study aims to explore the factors that influence the implementation of inclusive education in Indonesia and analyze the various obstacles faced by educational institutions in creating a friendly and equal learning environment. Using a qualitative approach, data were collected through literature studies. The results of the study indicate that the gap in access to educational facilities and infrastructure, the lack of trained educators, social strata and differences in understanding related to the concept of inclusion are the main factors that hinder the implementation of inclusive education. In addition, inconsistent education policy trends in various regions worsen this situation. Therefore, collaboration between the government, schools, and the community is needed to create a more inclusive and equitable education system. This study is expected to contribute to formulating effective and sustainable inclusive education policy strategies in the future.

Keywords: *Implementation, Inclusive Education, Issues of Access Gap and Trends*

Article Info

Received Date: 20 December 2024

Revised Date: 27 December 2024

Accepted Date: 04 January 2025

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, atau kebutuhan khusus. Prinsip ini melahirkan konsep pendidikan inklusif, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang terbuka bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Di Indonesia, pendidikan inklusif mulai mendapat perhatian seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Namun, dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusif masih menemui berbagai kendala yang kompleks.¹

¹ Kemendikbudristek, 'Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,

Didalam kajian Al-Qur'an dan Hadits terdapat beberapa dasar pembahasan yang bersinggungan dengan pendidikan inklusif dan segala hal yang penting dijadikan pedoman bagi kita sebagai pendidik dalam menerapkan pendidikan inklusif agar isu kesenjangan akses itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Diantara dalil tersebut dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian”. Hadits ini diriwayatkan antara lain oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya no. 2564.² Isinya menjelaskan salah satu prinsip penting ajaran Islam yaitu keterbukaan (inklusivisme) atas semua golongan atau kelompok manusia untuk dapat memperoleh hak yang sama, yakni posisi terbaik di sisi Allah.

Didalam Al-Qur'an surat 'Abasa ayat 1 sampai 7, Allah swt berfirman:

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكِّيَ وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يُسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ

Terjemahannya: Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy). Engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman).³

Kesenjangan akses terhadap pendidikan yang memadai menjadi salah satu tantangan utama. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, belum memiliki fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif. Selain itu, masih terdapat stigma sosial yang menghambat partisipasi anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam sistem pendidikan formal. Di sisi lain, kebijakan yang belum merata dan kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik memperparah ketidaksetaraan ini.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang berkaitan dengan kesenjangan akses dan tren dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang lebih efektif dalam mendukung terciptanya sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, makna, dan perspektif yang ada dalam fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari studi literatur terhadap berbagai hasil penelitian dan studi terdahulu yang masih relevan dengan topik penelitian. Dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur tersebut, peneliti akan menganalisis temuan-temuan sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek penelitian ini. Studi literatur menjadi sumber data yang penting dalam penelitian ini. Melalui tinjauan literatur, peneliti dapat mengakses dan mengumpulkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi penelitian-penelitian dan studi-studi terdahulu yang relevan dan masih memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Data yang diperoleh dari studi literatur tersebut akan digunakan untuk memperkuat argumen dan kesimpulan penelitian, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan pencarian literatur secara sistematis dan komprehensif menggunakan kata kunci yang relevan seperti “Implementasi”, “Pendidikan Inklusif”, dan “Isu Kesenjangan Akses dan Tren”. Proses ini mencakup pengumpulan, penyaringan, dan pemilihan literatur yang sesuai dengan kriteria inklusi.

Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan', *Kemendikbudristek*, 2023, 1–32 <<https://drive.google.com/file/d/1dTEwSA2W9mSGCZdvQxKfhIjdw33szuR/view>>.

² Muslim, *Hadits Shahih Muslim*, Da'wahrigth Publisher, 2010 <<http://telkom-hadits9imam.com>>.

³ Departemen Agama RI, 'Al-Quran Dan Terjemahannya', 2019.

Kriteria inklusi meliputi literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian.⁴

HASIL

Implementasi Pendidikan Inklusif

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan inklusif, implementasi merujuk pada proses penerapan prinsip dan praktik inklusif dalam lingkungan pendidikan, sehingga semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar bersama tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang menerima dan mengakomodasi semua anak, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lainnya. Konsep ini menekankan pentingnya keberagaman dalam pendidikan dan mendorong sekolah untuk menyesuaikan lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menghapus hambatan dalam pembelajaran dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua anak.

Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dinilai dapat memberdayakan individu serta mentransformasi masyarakat menuju keberlanjutan.⁵ Pendidikan untuk penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu. Konsep ini menekankan pentingnya memastikan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas bagi individu dengan berbagai jenis disabilitas. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan akademis, tetapi juga sebagai sarana untuk memfasilitasi integrasi sosial, pengembangan keterampilan hidup, dan pemberdayaan secara menyeluruh.⁶

Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Kebijakan Pendidikan inklusif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁷

Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah.⁸ UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.⁹

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai

⁴ Budi Yusuf, 'Journal of Instructional and Development Researches Teknologi Dan Personalisasi Pembelajaran Pendidikan Islam Untuk Generasi Z', *Journal of Instruction and Development Researches*, 4.4 (2024), 277–85 <<https://doi.org/10.53621/jider.v4i4.344>>.

⁵ Milasari and Nursiwi Nugraheni, 'Integrasi Pendidikan Konservasi Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Pendidikan Inklusif Dan Berkualitas Dalam Pencapaian SDGs', *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1.3 (2024), 119–25.

⁶ Diajeng Tyas Pinru Phytanza and others, *Pendidikan Inklusif*, 2023 <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=D1GmEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=menggalibibit+bakat+anak+usia+dini&ots=Fsnvm4_YDI&sig=9ETZx383-1ervnxLTNIBQn1biWY>.

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 'UUD Negara RI Tahun 1945', 2000, 1–28 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>>.

⁸ kemdikbud, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional', in *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, IV, 147–73.

⁹ presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas', in *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2016, LXXXV, 6.

dengan kebutuhan dan kemampuannya.¹⁰ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.¹¹

Kebijakan kurikulum juga menjadi fokus dalam implementasi pendidikan inklusif. Kurikulum Nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencakup panduan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan optimal. Program pendukung lainnya yang telah diterapkan mencakup pemberian dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program, seperti program bimbingan dan konseling, pendampingan, serta penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang inklusif.¹²

Kebijakan pendidikan inklusif juga mencakup upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi dalam pendidikan. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini melibatkan pemantauan, penilaian, dan tindakan perbaikan yang kontinyu guna memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua peserta didik.

Jenis-Jenis Disabilitas dalam Pendidikan Inklusif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai (1) anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; (2) anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan (3) anak di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga mereka semua berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.¹³

Selain cakupan tersebut di atas, konsep Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu PDBK yang bersifat sementara (temporer) dan PDBK yang bersifat menetap (permanent). PDBK yang bersifat sementara (temporer) adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. PDBK yang bersifat menetap atau permanent adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, antara lain: anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, dan gangguan perkembangan intelektual.¹⁴

Dari perspektif sosial, disabilitas merupakan suatu ketidakberfungsian.¹⁵ Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan, lumpuh, kehilangan anggota tubuh, cacat dan juga epilepsy.

b. Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki

¹⁰ Menteri Pendidikan Nasional, 'Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009', in *Permen Nomor 70 Tahun 2009*, 2009, XIX, 19.

¹¹ Kemendikbudristekditi, 'Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran', *Menpendikbudristek*, 2022, 1–112 <https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220711_121315_Fix_Salinan_JDIH_Kepmen_Perubahan_56_Pemulihan_Pembelajaran.pdf>.

¹² Justin Niaga Siman Juntak and others, 'Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia', *Ministrat: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5.2 (2023), 205–14 <<https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26904>>.

¹³ kemdikbud, IV.

¹⁴ Arriani Farah and others, 'Panduan Pendidikan Inklusif', *Kepala Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 2022, 3 <<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>>.

¹⁵ Phytanza and others.

kemampuan intelektual di bawah rata-rata, kesulitan untuk berkonsentrasi, berfikir untuk mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

d. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

Isu Kesenjangan Akses dan Tren

Pembelajaran yang efektif dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan dan pemahaman siswa, serta mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas pembelajaran tidak hanya bergantung pada metode pengajaran, tetapi juga pada cara pengajaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, serta bagaimana evaluasi dan umpan balik digunakan untuk memfasilitasi perkembangan siswa.

Pendidikan inklusi pemenuhan kebutuhan anak penyandang disabilitas tidak dimulai dari penyesuaian-penyesuaian anak terhadap sistem pendidikan, metode, maupun lingkungannya, melainkan seharusnya yang terjadi sebaliknya. Dalam suasana kelas, bukan anak yang menyesuaikan kurikulum, seharusnya kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan anak.¹⁶

Kenyataannya dalam perjalanan pendidikan inklusi banyak ditemukan isu dan kesenjangan, baik itu pada tingkatan penyelenggara pendidikan, tenaga pendidikan, fasilitas yang ada serta kondisi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang sering disebut juga siswa penyandang disabilitas, atau peserta didik berkebutuhan khusus. Berdasarkan hal inilah, dibawah ini adalah uraian tentang isu kesenjangan akses dan tren yang terjadi saat ini.

1. Definisi Isu

Isu dalam konteks ini adalah permasalahan atau tantangan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Isu bisa berupa hambatan struktural, sosial, atau kebijakan yang menghambat proses implementasi pendidikan inklusif. Contoh isu yang umum adalah kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya pelatihan guru, serta kebijakan yang belum mendukung sepenuhnya pendidikan inklusif.

Terdapat isu kesenjangan dalam sikap guru terhadap pendidikan inklusif, yang bervariasi antara sikap positif dan skeptis. Beberapa guru menunjukkan sikap positif dengan alasan inklusi dapat meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan adaptif siswa, serta membuka kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk berkembang bersama teman-teman sebaya. Sementara itu, guru lain menunjukkan kekhawatiran terkait kurangnya dukungan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk menangani kebutuhan siswa di kelas inklusif.¹⁷

Tantangan terbesar yang diidentifikasi oleh guru adalah keterbatasan dalam penguasaan strategi pembelajaran inklusif dan sumber daya yang dibutuhkan, seperti perangkat bantu belajar, asisten guru, dan program pelatihan berkelanjutan. Guru merasa kesulitan dalam mengelola kelas dengan kebutuhan siswa yang sangat bervariasi, terutama dalam hal mengakomodasi siswa dengan gangguan yang lebih kompleks.

2. Kesenjangan Akses

Kesenjangan akses merujuk pada perbedaan atau ketidaksetaraan dalam kesempatan

¹⁶ Darul Safitri and Yuli Salis Hijriyani, 'Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Mewujudkan Pendidikan Menyeluruh Bagi Anak Usia Dini', *PROSIDING: Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini LAIN Ponorogo*, 3 (2021), 27–39 <https://prosidingsia.inponorogo.ac.id/index.php/pi_aud/article/view/448>.

¹⁷ Naufal Qadri Syarif, 'Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pendidikan Inklusif Di SLB Negeri 1 Makassar : Tantangan Dan Peluang', *JUARA SD : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3.November (2024), 370–74.

mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam pendidikan inklusif, kesenjangan ini terjadi ketika anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas, kurikulum, atau layanan pendidikan dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Faktor geografis, ekonomi, dan sosial sering kali menjadi penyebab utama kesenjangan akses ini.

Diantara kesenjangan tersebut disebabkan oleh strata sosial. Stratifikasi sosial umumnya terkait dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kekayaan dan kekuasaan. Misalnya, dalam ekonomi, ketidaksetaraan sosial dapat terlihat dalam perbedaan pendapatan dan kekayaan antara individu atau kelompok. Beberapa orang mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, sementara yang lain mungkin hidup dalam kemiskinan atau dengan akses terbatas terhadap kesempatan ekonomi.

Didang pendidikan, ketidaksetaraan bisa tercermin dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Orang dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan yang berkualitas, sementara individu dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin menghadapi hambatan dalam hal biaya, fasilitas, atau akses informasi.¹⁸

Adapun ketidaksetaraan dalam kesehatan mencakup perbedaan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Orang dari kelompok ekonomi yang lebih rendah seringkali memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang baik, serta mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Secara keseluruhan maka bisa di mengerti bahwa saat ini yang paling mendominasi kesenjangan akses pendidikan secara inklusif adalah strata sosial, terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

3. Tren

Tren dalam pendidikan inklusif merujuk pada arah perkembangan dan perubahan kebijakan serta praktik pendidikan yang terjadi seiring waktu. Tren positif dalam pendidikan inklusif di Indonesia mencakup meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusi, peningkatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, dan bertambahnya program pelatihan guru. Namun, tren negatif seperti ketidakseragaman kebijakan antar daerah dan lambatnya implementasi di tingkat lokal masih menjadi tantangan.

Beberapa contoh kasus tren ketersediaan layanan pendidikan inklusif di kota Mataram, diantaranya adalah data mengenai anak dengan disabilitas masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemutakhiran data anak dengan disabilitas ini belum dapat menggambarkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan respon dari dinas pendidikan Kota Mataram. Meskipun data mengenai angka partisipasi anak bersekolah di sekolah umum dan sekolah luar biasa dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum atas kesenjangan tersebut namun belum dapat menggambarkan situasi riil yang terjadi.¹⁹

Contoh lain tentang tren yang ada di kota-kota besar adalah adanya forum-forum yang menjadi wadah bagi para pendidik dari lefel prasekolah sampai perguruan tinggi yang memiliki siswa atau mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus, juga yang menjadi anggotanya adalah orangtua dari keluarga yang memiliki anggota berkebutuhan khusus. Misalnya di kota Makassar adanya Forum Keluarga Spesial Indonesia (FORKESI). Mereka berkumpul disini untuk saling berbagi informasi dan motivasi yang berhubungan dengan sekolah, kegiatan formal maupun nonformal, kegiatan vokasi, terapi, perkembangan dan penanganan yang mensupport pendidikan inklusif baik secara langsung maupun tidak langsung ataupun didalam dan diluar sekolah.

Salah satu kegiatannya adalah pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) diantaranya adalah kegiatan lelang karya dan perform ABK. Dengan kegiatan vokasi ini dapat memfasilitasi ABK untuk mengeksplor kemampuannya dan berkesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Selain itu, ABK juga dapat mengenal proses jual beli melalui tawar menawar yang berlangsung pada lelang. Program Vokasi ABK pun mendapat donasi dari hasil lelang. Dengan demikian, semakin banyak keterampilan yang dapat dilatihkan pada ABK. Melalui program-program seperti ini, ABK dan keluarganya dapat terhubung dengan berbagai pihak yang dapat mendukung sejumlah kegiatan yang dapat memfasilitasi pengembangan diri ABK mencapai

¹⁸ Armansyah, Devi Noviarani, and Rusyiana, 'Implementasi Sistem Pendidikan Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan: Pengaruh Terhadap Stratifikasi Sosial', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4.3 (2024), 17235–43.

¹⁹ Juhri, 'Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar', *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2.4 (2023), 425–31 <<https://doi.org/10.51878/manajerial.v2i4.1916>>.

kemandirian.²⁰

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap definisi dan konsep tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mendukung implementasi pendidikan inklusif secara lebih efektif di Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Dari hasil studi literatur, ditemukan bahwa:

1. Kesenjangan fasilitas sekolah dan strata Sosial, banyak sekolah di daerah terpencil belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif. Beberapa orang mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, sementara yang lain mungkin hidup dalam kemiskinan atau dengan akses terbatas terhadap kesempatan ekonomi.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, tenaga pendidik yang memiliki pelatihan dan pemahaman dalam mendukung pendidikan inklusif masih minim. Guru-guru di berbagai sekolah sering kali belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pengajaran inklusif.
3. Ketidakmerataan kebijakan, kebijakan pendidikan inklusif belum diterapkan secara merata di seluruh daerah. Beberapa daerah telah menerapkan program inklusif yang baik, sementara daerah lain masih tertinggal.
4. Stigma sosial, masih terdapat stigma negatif dari masyarakat terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, yang menghambat integrasi mereka dalam lingkungan pendidikan formal.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tren positif berupa meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan inklusif di kalangan pemangku kepentingan dan para pemerhati. Program pelatihan guru dan kampanye kesadaran publik mulai menunjukkan dampak positif dalam mendukung pendidikan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pendidikan inklusif di masa depan.

SIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan elemen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terdapat potensi besar untuk perbaikan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat. Upaya untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur, meningkatkan kapasitas guru, serta menyelaraskan kebijakan secara nasional menjadi kunci utama dalam mempercepat realisasi pendidikan inklusif. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

REFERENSI

- Armansyah, Devi Noviarani, and Rusyiana, 'Implementasi Sistem Pendidikan Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan: Pengaruh Terhadap Stratifikasi Sosial', *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4.3 (2024), 17235–43
- Farah, Arriani, Agustiyawati, Alifia Rizki, Ranti Widiyanti, Slamet Wibowo, Christina Tulalessy, and others, 'Panduan Pendidikan Inklusif', *Kepala Pusat Kurikulum Dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, 2022, 3 <<https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>>
- Juhri, 'Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar', *Jurnal Inovasi Manajemen*

²⁰ Haerani Nur and others, 'Memperkenalkan Wirausaha Pada Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Lelang Karya', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2006, 2022, 1–8 <<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Ridwah/publication/365610943/publication/365610943>>.

- Dan Supervisi Pendidikan*, 2.4 (2023), 425–31 <<https://doi.org/10.51878/manajerial.v2i4.1916>>
- Juntak, Justin Niaga Siman, Alfredo Rynaldi, Eka Sukmawati, Mudrikatul Arafah, and Tekat Sukomardojo, 'Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia', *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5.2 (2023), 205–14 <<https://doi.org/10.15575/jbp.d.v5i2.26904>>
- kemdikbud, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional', in *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003, IV, 147–73
- Kemendikbudristek, 'Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan', *Kemendikbudristek*, 2023, 1–32 <[https:// drive.google.com /file/d/1dT EwSA2W9mSGCZdvQxKfhlj dw33szuR/view](https://drive.google.com/file/d/1dT EwSA2W9mSGCZdvQxKfhlj dw33szuR/view)>
- Kepmendikbudristekdikti, 'Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran', *Menpendikbudristek*, 2022, 1–112 <https://jdih.kemdik bud.go.id/sjdih/siperpu/doku men/salinan/salinan_20220711_121315_Fix Salinan JDIH_ Kepmen Perubahan 56 Pe mulihan Pembelajaran.pdf>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 'UUD Negara RI Tahun 1945', 2000, 1–28 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>>
- Menteri Pendidikan Nasional, 'Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009', in *Permen Nomor 70 Tahun 2009*, 2009, XIX, 19
- Milasari, and Nursiswi Nugraheni, 'Integrasi Pendidikan Konservasi Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Pendidikan Inklusif Dan Berkualitas Dalam Pencapaian SDGs', *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1.3 (2024), 119–25
- Muslim, *Hadits Shahih Muslim, Da'wahrigth Publisher*, 2010 <<http://telkom-hadits9imam.com>>
- Nur, Haerani, Kurniati Zainuddin, MA Alwi, N Rasyid, and HN Istiqamah, 'Memperkenalkan Wirausaha Pada Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Lelang Karya', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2006, 2022, 1–8 <<https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Ridfah/publication/365610943.pdf>>
- Phytanza, Diajeng Tyas Pinru, Ridwan Agustian Nur, Silatul Rahmi, Adolfina Oualeng, Putri Sari MJ Silaban, Suyuti, and others, *Pendidikan Inklusif*, 2023 <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=D1GmEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=menggali+bibit+bakat+anak+usia+dini&ots=Fsnvm4_YDl&sig=9ETZx383-1ervnxLTNIBQn1bIWY>
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas', in *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2016, LXXXV, 6
- RI, Departemen Agama, 'Al-Quran Dan Terjemahannya', 2019
- Safitri, Darul, and Yuli Salis Hijriyani, 'Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi Mewujudkan Pendidikan Menyeluruh Bagi Anak Usia Dini', *PROSIDING: Loka Karya Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Ponorogo*, 3 (2021), 27–39 <<https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/piaud/article/view/448>>
- Syarif, Naufal Qadri, 'Persepsi Guru Terhadap Penerapan Pendidikan Inklusif Di SLB Negeri 1 Makassar: Tantangan Dan Peluang', *JUARA SD: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 3.November (2024), 370–74
- Yusuf, Budi, 'Journal of Instructional and Development Researches Teknologi Dan Personalisasi Pembelajaran Pendidikan Islam Untuk Generasi Z', *Journal of Instruction and Development Researches*, 4.4 (2024), 277–85 <<https://doi.org/10.53621/jider.v4i4.344>>